

Public Values Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro

Putri Handayani¹, Ahmad Suprastiyo², Heny Suhindarno³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bojonegoro Jawa Timur

¹ putrihandayani19092001@gmail.com, ²tiyopras207@gmail.com,

³hsuhindarno@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain the public value of the poor death compensation program in Bojonegoro Regency as perceived by the general public. The Death Compensation Program for the Poor in Bojonegoro Regency is designed to provide assistance to poor heirs whose family members have died as a manifestation of the concern of the Bojonegoro Regency Government. This research uses Mark Moore's public value theory, Legitimacy and Support, Operational Skills, and Substantial Value. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. In this study, a purposive sampling strategy was used to identify informants. Through research it is known that the Death Compensation Program for the Poor in Bojonegoro Regency has received support from the community, from an operational capability perspective supported by quality human resources, technology and finance. In terms of substantial value, it has benefits from economic value, social and social value, and political value. Although there are still several obstacles, especially in terms of data filling by the public and telecommunications networks.

Keywords: Public Values, Death Compensation Program, Poverty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai publik program santunan kematian miskin di Kabupaten Bojonegoro dipersepsikan oleh masyarakat umum. Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro ini dirancang untuk memberikan bantuan untuk ahli waris yang tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal dunia sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini memakai teori nilai publik Mark Moore, Legitimasi dan Dukungan, Keterampilan Operasional, dan Nilai Substansial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini digunakan strategi purposive sampling untuk mengidentifikasi informan. Melalui penelitian diketahui bahwa Program Santunan Kematian Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro mendapat dukungan dari masyarakat, perspektif kemampuan operasional ditunjang oleh SDM yang berkualitas, teknologi dan finansial. Dari segi nilai substansial memiliki manfaat dari nilai ekonomi, nilai sosial dan sosial, serta nilai politik. Walaupun masih terdapat beberapa kendala terutama dalam hal pengisian data yang dilakukan oleh masyarakat dan jaringan telekomunikasi.

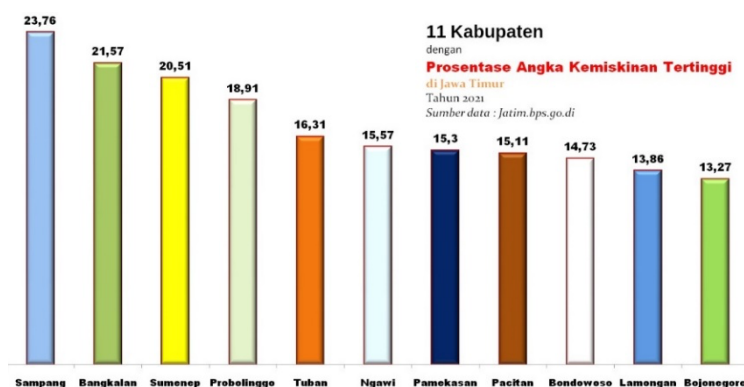
Kata kunci: Nilai Publik, Program Santunan Kematian, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Tingkat kebutuhan yang tinggi masih menjadi isu yang sedang berkembang di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika seseorang tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari, maka ia berada dalam kemiskinan. Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan biasanya diartikan sebagai jaminan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan dan kebutuhan lainnya. Dan itu menyiratkan bahwa seseorang berada dalam kondisi kekurangan uang untuk memenuhi atau menjamin kebutuhan ketahanannya. Penduduk yang termasuk dalam kelompok penduduk miskin mempunyai rata-rata pengeluaran / kapita bulanan yang ada di bawah garis kemiskinan (N. Dewi *et al.*, 2017)

Tidak hanya disebuah negara, di Kota / Kabupaten juga tidak terbebas dari masalah kemiskinan. Salah satunya Kabuptaten Bojonegoro, kemiskinan menjadi masalah yang cukup besar bagi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang memiliki APBD 2023 sebesar 7,4 triliun yang berada di peringkat ke-2 tertinggi di Indonesia. Namun, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro menempati peringkat tertinggi ke- 11 di Jawa Timur.



Gambar 1. Persentase Angka Kemiskinan Tertinggi di Jawa Timur
Sumber: Jatim.bps.go.id

Berdasarkan grafik diatas Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat ke 11 sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur yaitu sebesar 13,27 pada tahun 2021 dan 12,21% pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2023)

Ada empat (4) strategi penanggulangan kemiskinan menurut Anwar Mukhtadlo. Pertama, beban pengeluaran terhadap masyarakat miskin. Kedua, kenaikan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin. Ketiga, memberantas daerah-daerah yang dilanda kemiskinan. Keempat, program strategi penurunan energi kemiskinan yang kooperatif. Dengan APBD yang sangat besar, Pemerintah Daerah (Pemkab) Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk berinovasi dengan berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat Bojonegoro.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menanggulangi kemiskinan jangka pendek di Kabupaten Bojonegoro adalah membuat program Penyaluran Santunan Duka bagi warga miskin di Kab. Bojonegoro. Program Pemkab Bojonegoro pemberian Santunan Duka kepada ahli waris sudah berlangsung dari tahun 2018 sampai sekarang. Pengajuan Program Santunan Duka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih secara offline ke Kantor Pemkab

Bojonegoro bagian Kesejahteraan Rakyat sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berinovasi menciptakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pengajuan Santunan Duka secara online yang diberi nama "SANDUK" (Santunan Duka). Aplikasi ini diluncurkan dengan tujuan mewujudkan pelayanan melalui sebuah sistem yang terkelola dengan baik yang dapat diakses secara cepat, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengajukan Santunan Duka, namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala yaitu, masyarakat semakin kesulitan dalam memakai dan memahami aplikasi tersebut, karena tidak semua ahli waris yang ingin mengajukan Santunan Duka memahami teknologi yang semakin canggih dan terdapat persyaratan dokumen – dokumen yang harus dilengkapi dan diupload ke dalam aplikasi "SANDUK" dengan cara mengecilkan ukuran dokumen terlebih dahulu, selain itu mayoritas penduduk di Bojonegoro bertempat tinggal di desa dan tidak sedikit pula yang kesulitan mengupload dokumen karena signal handphone yang lemah, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat di Bojonegoro yang ingin mengajukan Santunan Duka dan menyebabkan beberapa masyarakat tidak mengajukan santunan duka. Hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memberikan suatu program untuk meringankan beban masyarakat di Bojonegoro namun tidak dimanfaatkan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Pakarti, 2018) yang menemukan bahwa strategi segitiga nilai publik dapat diterapkan untuk mencapai nilai publik. Ada tiga komponen strategi segitiga: legitimasi dan dorongan, keterampilan operasional, dan nilai substansial. Hal ini cenderung dianggap bermanfaat dan bermakna bagi masyarakat, hal ini bisa ditinjau dari tiga bagian metodologi segitiga yang sudah tercukupi Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Safira, 2018) mengungkapkan bahwa program santunan kematian di Bojonegoro masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Terdapat implikasi khususnya dalam hal sosialisasi serta adanya perubahan sistem menjadi online dari pelaksanaan program tersebut.

Peneliti tertarik untuk mengkaji nilai-nilai publik yang dibuat oleh Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro, menurut latar belakang yang telah diuraikan. Menurut teori nilai publik, suatu layanan atau program mesti mencukupi segitiga strategis Mark Moore yaitu keterampilan operasional, nilai substantif, serta legitimasi dan dukungan agar berhasil. Program Santunan Kematian telah berjalan selama lima tahun (2018–2023) dan telah mampu mengurangi beban keuangan keluarga miskin yang ditelantarkan oleh keluarganya. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengajukan karena tidak semua ahli waris yang mau menyetujui Santunan Duka memahami teknologi yang semakin berkembang. Peneliti memilih teori Nilai Publik ini sebab bisa menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang permasalahan sebelumnya. *Public Value* Program Santunan Kematian akan menjadi kajian pertama yang membahas mengenai Nilai – Nilai publik dari adanya Program Santunan Kematian. Penelitian mengenai *Public Value* secara kuantitas banyak ditemukan, namun peneliti belum menemukan kajian *Public Value* Program Santunan Kematian.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait *Public Values* Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro ini memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Mack, dkk,2005:8) eksplorasi subjektif adalah penelitian yang memberikan gambaran sastra yang kompleks tentang keterlibatan seorang spesialis dalam mencatat persoalan pemeriksaannya. Menurut (Hardani, 2020:54) Pendekatan deskriptif dan kualitatif digunakan dalam penelitian Program Nilai Publik Santunan Kematian Masyarakat Miskin Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang berusaha untuk secara berkala dan sesuai mengkarakterisasi gejala, fakta, atau peristiwa yang berkenaan dengan populasi atau daerah itu dikenal sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang dihimpun dengan observasi, wawancara dan dokumentasi daripada data kuantitatif yang dikumpulkan melalui sarana numerik. Data yang dipakai asalnya dari sumber primer dan sekunder. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan dan data yang dikumpulkan berupa foto-foto atau observasi langsung dijadikan sebagai sumber informasi primer. Informasi tambahan diperoleh melalui konsentrat tulisan terkait dengan isu-isu *Public Values* sebagai proses dari buku, laporan, buku harian, web, atau sumber penting lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro ini merupakan sebuah program pemberian bantuan yang diperuntukan untuk ahli waris yang tidak bisa sebagai perwujudan kepedulian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat kurang mampu yang terkena musibah, yaitu anggota keluarganya meninggal dunia. Pemberian Santunan Kematian ini hanya diperuntukkan bagi warga meninggal dunia yang sakit/ hal yang wajar. Program ini adalah salah satu dari 17 prioritas program Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati , Anna Muawanah dan Budi Irawanto, yang jadi komitmen politik mereka selama menjalankan misi Pemerintah Daerah Bojonegoro membuat Program Santunan Kematian sebagai salah satu bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat miskin yang anggota keluarganya ditinggalkan. Beberapa syarat dalam pengajuan Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Bojonegoro sebagai berikut:

1. Mewujudkan Surat Permohonan kepada Pejabat Kepala Daerah
2. Surat kematian berasal dari Kepala Desa.
3. Hubungkan bukti verifikasi penanganan autentikasi kematian/salinan surat wasiat kematian dari DISDUKCAPIL
4. Surat Keterangan Suksesi Ahli Waris
5. Masuk ke DTKS: Bagi yang belum masuk DTKS, Kepala Desa dan tokoh masyarakat lainnya harus melakukan verifikasi atau memberikan rekomendasi.

6. Lampirkan foto copy e-KTP/KK warga yang mewariskan dan penerima manfaat utama
7. Akta Kelahiran bagi ahli waris yang belum mempunyai KTP elektronik
8. Tampak depan rumah ahli waris, dengan didampingi ahli waris oleh aparat kelurahan atau desa
9. Membawa materai Rp 10.000 (dua lembar).
10. Copy buku rekening Bank Jatim (penerima)
11. Bagian Kesra menerima tiga eksemplar berkas asli

Program ini memang ditujukan untuk masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro agar dapat meringankan beban dalam mencukupi kebutuhan anggota ahli waris pasca sepeningalnya anggota keluarganya, jadi nantinya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan jadi koordinator program ini, sebab kecamatan yang berada di wilayah Bojonegoro cukup banyak, maka dari itu dibutuhkan koordinator agar penyaluran dari program ini dapat terkoordinir dan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari uraian itu maka pelaksana untuk merekomendasikan penerima bantuan dilakukan secara berjenjang, yaitu mulai dari Kasi Kesejahteraan Umum di tiap – tiap desa / kelurahan yang kemudian merekomendasikan ke Kasi Kesejahteraan Umum di kecamatan sampai dengan Kasi Kesejahteraan Umum yang ada di Kab Bojonegoro

Peraturan Bupati juga menetapkan program ini bagi masyarakat miskin di Kab Bojonegoro untuk menerima manfaat kematian, yaitu Peraturan Bupati No 2 Tahun 2023 Mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan No 49 Tahun 2018 Tentang Aturan Pemberian Remunerasi Kematian Kepada Masyarakat Miskin Di Bojonegoro. Hanya ahli waris yang tidak mampu secara ekonomi, berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, dan termasuk dalam kelompok DTKS atau PKH yang dapat mengajukan permohonan santunan kematian dalam jangka waktu 30 hari sejak meninggalnya orang tersebut. (O' Flynn,2007)

Public Value (Nilai Publik)

Gagasan tentang Nilai Publik (Public Value) sebagaimana dikemukakan oleh (O' Flynn,2007) nilai publik dideskripsikan sebagai suatu perkembangan yang mempunyai banyak segi, suatu kesan kecenderungan-kecenderungan yang bekerja sama secara keseluruhan, dimediasi secara politis dan dikonsumsi oleh warga masyarakat, dibuat oleh "hasil" dan juga oleh proses yang menghasilkan kepercayaan. Nilai publik, seperti yang digunakan pada analisis ini, ialah rangka kerja untuk mengarahkan program atau layanan publik untuk menciptakan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi persyaratannya.

Aspek nilai publik merupakan segitiga esensial yang terdiri dari tiga sudut pandang yang harus dipenuhi, yaitu *Operational Capabilities*, *Legitimacy and Support* serta *Substantively Valuable*. Pemangku kepentingan perlu berpikir strategis dan mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut berdasarkan gagasan nilai publik. Ketiga perspektif ini tidak dapat dipisahkan karena jika salah satu sudut pandang ini diabaikan maka pembentukan nilai publik yang normal akan hilang.

1. *Legitimacy and Support*, khususnya penarikan sumber daya secara bersamaan yang dapat mendukung, khususnya politik dan mitra lain karena alasan mengakui kekuatan perbedaan. Sedangkan legitimasi merupakan dorongan masyarakat luas pada kewenangan yang sudah ada. Hal ini terlihat dari peraturan perundang-undangan atau program, sosialisasi yang dilaksanakan, dan reaksi masyarakat pada program yang dijalankan.
2. *Operational Capabilities*, adalah keterampilan yang layak secara administratif dan operasional, yaitu kemampuan yang dapat dicapai dengan keterampilan internal dan eksternal organisasi yang diperlukan untuk menghasilkannya. Tugas mitra tidak hanya sebagai wakil laten yang sekedar membantu administrasi dalam organisasi, namun juga sebagai penghibur dinamis dalam mengelola sumber daya dengan cerdas untuk memberikan bantuan publik yang berkualitas kepada daerah. Kemampuan sumber daya manusia, teknologi/infrastruktur, dan pengelolaan keuangan semuanya termasuk dalam kemampuan operasional ini.
3. *Substantively Valuable* (Nilai Substansial) Dalam eksplorasi ini yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh klien atau kelompok sasaran dalam ruang nilai moneter, nilai politik, nilai sosial dan sosial, nilai pendidikan dan nilai alam.

Public Values (Nilai-nilai Publik) Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro

Sesuai dengan konsep nilai pulik, bahwa untuk menghasilkan nilai publik maka aspek aspek segitiga strategis yang harus dipenuhi , yaitu sebagai berikut:

a. *Legitimacy and Support* (Legitimasi dan Dukungan)

Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro memiliki legitimasi sebagai berikut:

1. Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018.
2. Terdapat perubahan pada Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2019, menggantikan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018.
3. Perubahan kedua terhadap Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2021, yang mengamandemen Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018.
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2023 merupakan perubahan ketiga terhadap Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro, yang semula diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018.

Dalam hal dukungan masyarakat, program ini mendapat banyak umpan balik dan dukungan yang baik. Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap, dan masyarakat setuju dengannya. yang dilakukan melalui tiap-tiap kecamatan di Bojonegoro yang dilakukan dengan tahapam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengundang Camat se- Kabupaten Bojonegoro, kemudian Camat menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra Kecamatan) untuk menerima sosialisasi dari Pemkab Bojonegoro Bagian Kesejahteraan Rakyat mengenai Peraturan Bupati Bojonegoro No 49 Tahun 2018.

b. *Operational Capabilities* (Kemampuan Operasional)

SDM yang memadai telah mendukung kemampuan operasional Program Santunan. Hal ini dikarenakan stakeholder dalam pelaksanaan program harus mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Lalu untuk sumber daya teknologi yang dipakai, menurut wawancara dengan pihak Pemkab Bojonegoro, sumber daya teknologi yang digunakan adalah sebuah aplikasi penunjang yang diberi nama "SANDUK" yaitu aplikasi untuk pendaftaran pengajuan Program Santunan Kematian secara online agar lebih memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengajuan bantuan.

Tahun	Jumlah Penerima Bantuan	Jumlah Anggaran Bantuan
2019	2384 orang	Rp 5,9 miliar
2020	4288 orang	Rp 10,7 miliar
2021	8624 orang	Rp 21,5 miliar
2022	9000 orang	Rp 22,5 miliar
Sementara 2023	7541 orang	Rp 33 miliar

Gambar 2. Jumlah Penerima Manfaat Santunan Kematian Di Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 20 November 2023

Berdasarkan tabel di atas, untuk sumber keuangan yang dipakai asalnya dari APBD Kabupaten Bojonegoro, yang tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2023 ini anggaran dialokasikan sebesar 33 Miliar. Besaran dana dari Program Santunan per ahli waris pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, yang mulanya menerima anggaran sebesar Rp 2.500.000, pada tahun ini menerima sejumlah Rp 3.000.000 per ahli waris dan anggaran tersebut digunakan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah.

c. *Substantively Valuable* (Nilai Substansial)

Selain penerapannya yang praktis, Program Jaminan Kematian Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai nilai publik atau lebih, termasuk sosial, nilai ekonomi, politik dan budaya.

- a. Nilai Ekonomi, yaitu masyarakat kurang mampu di Bojonegoro merasa terbantu secara ekonomi karena program bantuan ini diberi untuk membantu beban masyarakat yang tertimpa musibah, yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan keluarga ahli waris pasca sepeningalnya anggota keluarga.
- b. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro prihatin dengan kesejahteraan penduduk miskin di wilayah tersebut yang telah kehilangan orang yang dicintai, dan inisiatif ini merupakan contoh komitmen mereka terhadap nilai-nilai sosial dan budaya. Terdapatnya program ini juga dapat mempererat hubungan sosial antara pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat merasa diperdulikan dan masalah yang dialami bisa terselesaikan.
- c. Nilai Politik, terdapatnya program ini bisa memicu keikutsertaan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro untuk lebih mendukung pelaksanaan program yang telah dijalankan selama ini sehingga masyarakat yang ingin mengajukan bantuan program santunan duka bisa merasakan wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meringankan beban masyarakatnya

KESIMPULAN DAN SARAN

Nilai publik dapat dicapai jika memenuhi nilai publik yang strategis. Legitimasi dan Dukungan (Legitimacy and Support), Kemampuan Operasional (Operational Capability), dan Nilai Substantif (Substantively Valuable) merupakan tiga komponen dari strategi segitiga. Program Pemberian Santunan Duka Bagi Masyarakat Miskin di Kab Bojonegoro bisa dinyatakan bermanfaat dan bernilai publik bagi masyarakat, terbukti dari ketiga aspek yang telah terpenuhi berdasarkan penelitian lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan masih ada hal – hal yang jadi masalah. Seperti yang dinyatakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa dalam pengisian data dalam pengajuan santunan duka masih kurang lengkap, beberapa masyarakat terkadang lupa mengisi salah satu format di dalam aplikasi. Yang kedua, Masalah signal, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang tinggal di pedesaan terkendala oleh signal yang lemah, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan. Yang ketiga, masyarakat harus melakukan penyerahan berkas berkas pengajuan santunan duka secara langsung ke Pemerintah Kabupaten Bojonegoro walaupun sudah mengunggah dokumen melalui aplikasi “SANDUK”

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk mengoptimalkan sosialisasi tentang program bantuan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro agar wilayah program itu lebih luas dan merata, dan masyarakat bisa memahami maksud dan manfaat dari program itu, selain itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus memperbanyak jaringan telekomunikasi di pedesaan sehingga masyarakat Bojonegoro mudah dalam mengakses aplikasi "SANDUK" sehingga pengajuan bantuan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kab dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, V. (2014). Implementasi Kebijakan Santunan Kematian Bagi Penduduk di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Unpad*, 3(3). <https://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/3581>
- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. <https://bojonegorokab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>
- Ensiklopedia Dunia. (n.d.). *Nilai Publik*. Ensiklopedia Dunia UNIVERSITAS STEKOM | STIE STEKOM. Retrieved December 1, 2023, from https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Nilai_publik
- Eprilianto, D. F., Oktariyanda, T. A., & Sari, Y. E. K. (2022). Inovasi Digital dalam Sektor Publik: Studi Deskriptif Tentang Value Added Inovasi Pelayanan Kesehatan. *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 33–49. <https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.14357>
- Faujiyah. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik* [Skripsi. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra]. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1650/>
- Herdiana, D., Royani, Y. M., & Wahidah, I. (2022). The Public Value of e-Government at The Village Level. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(1), 78–90. <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i1.18011>
- Pakarti, D. B. (2018). *Public Values Kebijakan Dinas Sosial Kota Surabaya: Studi Tentang Nilai-Nilai Publik Program Campus Social Responsibility Kota Surabaya* [Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya]. <https://repository.unair.ac.id/74549/>
- Peraturan Bupati (PERBUP). (2019). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERBUP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro*.
- Peraturan Bupati (PERBUP). (2023). *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan*

Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro.

Safira, N. I. (2023). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro* [Skripsi. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya]. <https://repository.upnjatim.ac.id/17936/>

Savi'ah, R. N. (2021). Membangun Public Value dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dengan Metode Thermal. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 5(2), 24–33. <https://jom.untidar.ac.id/index.php/jman/article/view/1981>